

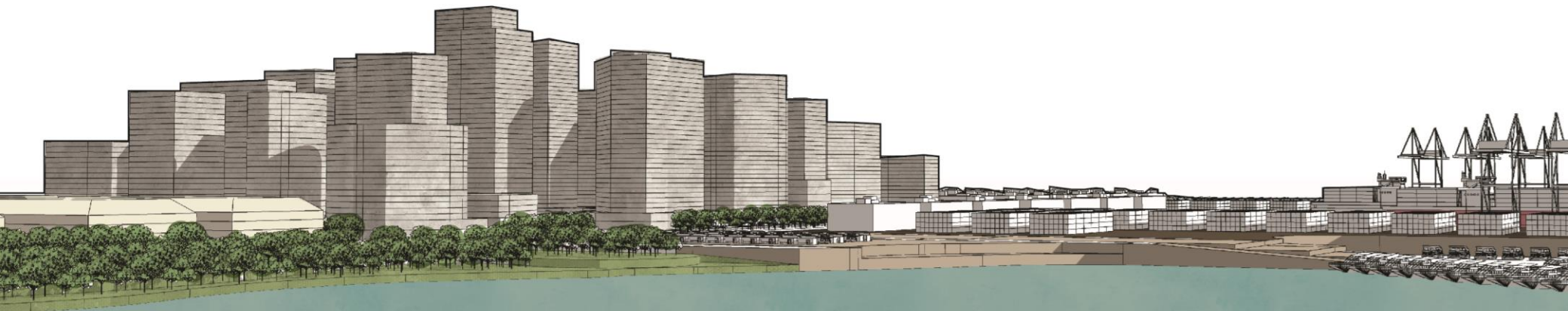


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Batam, 6 Maret 2021

Oleh:
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang



Outline Presentasi

1

Arahan Kebijakan Kawasan BBK

2

Overview Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

3

Hasil Rapat Pembahasan Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK



Arah Kebijakan dan Skenario Pengembangan Kawasan BBK

Jakarta, 30 Oktober 2019



“Mengintegrasikan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun”

Deskripsi Program:

- Pengembangan sektor industri dan jasa strategis yang terintegrasi dan saling mendukung
- Pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi (antar pulau BBK dan Singapura); dan
- Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait perizinan investasi, fasilitas dan kemudahan investasi

Tujuan:

- Meningkatkan investasi di Kawasan BBK;
- Meningkatkan arus barang dan penumpang dalam Kawasan BBK dan keluar Kawasan BBK;
- Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kawasan BBK; dan
- Percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan BBK.

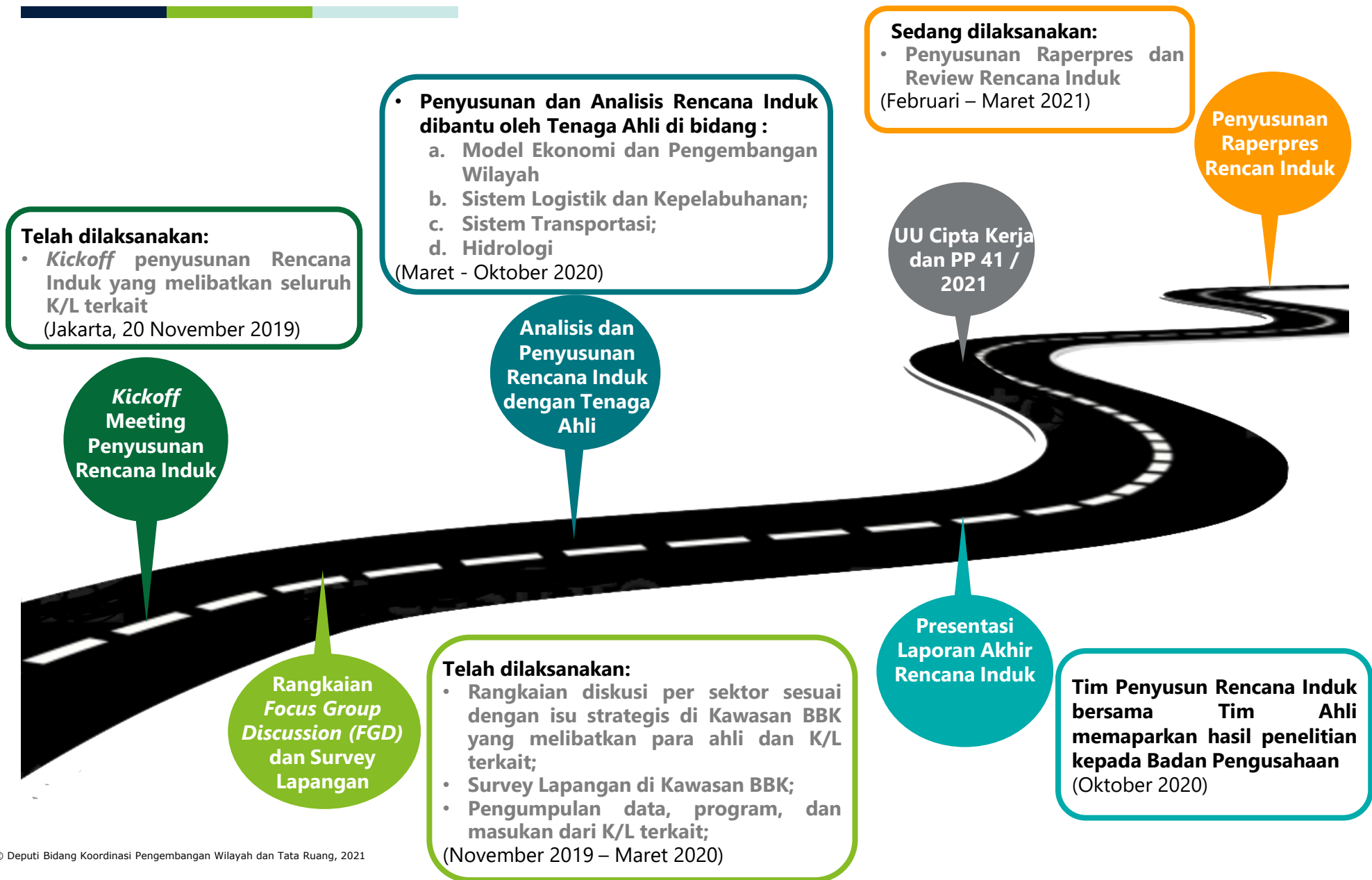


Di dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK (Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang) akan dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan *core business* / industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB.



Timeline Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Rencana Induk disusun sejak November 2019



Amanat Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Pasal 67 ayat (6) PP KPBPB



Peraturan Pemerintah

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya saing KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun, disusun Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) **Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.**



Rencana induk disusun dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan batam, bintan, karimun pada Pasal 67 (ayat 6) dan ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan



PERATURAN PRESIDEN

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

Rancangan Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK terdiri dari:

- Latar Belakang dan Tujuan
- Ruang Lingkup
 - Wilayah
 - Jangka Waktu
- Fungsi dan Manfaat
- Ketentuan *Masterlist* Program/Proyek
- Amanat *Development Plan*
- *Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan*



10 Pasal



Lampiran

(Dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK)



Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebagai Lampiran Perpres telah selesai disusun. Dokumen tersebut terdiri dari 6 Bab dengan 407 halaman.

Substansi Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Draft per 3 Maret 2021



Latar Belakang dan Tujuan

- Rencana Induk disusun dalam rangka peningkatan competitive advantage Kawasan BBK, baik di dalam dan luar negeri;
- Rencana Induk disusun sebagai pedoman integrasi pembangunan dan pengelolaan Kawasan BBK



Ruang Lingkup

- Kawasan BBK yang dimaksud meliputi Kota Batam, Kab Bintan, Kab. Karimun dan Kota Tanjungpinang yang meliputi area FTZ dan Non-FTZ;
- Jangka waktu perencanaan selama 25 tahun, 2020-2045



Fungsi dan Manfaat

- Rencana Induk berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Pengelola untuk menyusun rencana tata ruang, rencana strategis, dan pengelolaan di Kawasan BBK;
- Rencana Induk juga berfungsi sebagai pedoman bagi badan usaha untuk melakukan investasi di Kawasan BBK dalam rangka mendukung visi pengembangan Kawasan;



Fasilitas Program/Proyek

- Ketentuan Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN berlaku pula bagi pelaksanaan Perpres ini.



Amanat Development Plan

- Untuk pelaksanaan Rencana Induk, Badan Pengusahaan menyusun development plan dan rencana investasi untuk kawasan yang bersifat strategis dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan;
- Kawasan strategis ialah yang mendukung visi Kawasan BBK;



Tata Kelola

- Rencana Induk ditinjau kembali secara berkala setiap 5 tahun atau sesuai kebutuhan pembangunan nasional;
- Ketua Dewan Kawasan dapat memberikan rekomendasi kegiatan pembangunan dalam hal kebijakan nasional bersifat strategis yang belum termuat dalam Rencana Induk



Monitoring dan Evaluasi

- Monev dilakukan oleh Dewan Kawasan;
- Dewan Kawasan akan membantu penyelesaian permasalahan (*debottlenecking*)
- Hasil Monev akan dilaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun



Pendanaan

- Pendanaan pelaksanaan Rencana Induk bersumber dari: APBN, APBD, KPBU, dan sumber pembiayaan lain yang sah;



Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Pelaksanaan Proyek

(Izin Lokasi/Penetapan Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Mendirikan Bangunan, dan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal)



Dukungan Dalam Penyesuaian Tata Ruang

(Rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh K/L terkait sesuai PP 13/2017 tentang RTRWN pasal 114A, IPPKH, dan penyediaan tanah)



Pengadaan Lahan dan Lokasi dapat mengacu kepada UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

(Prioritas atas penyediaan tanah, penggunaan tanah milik Pemerintah)



Penggunaan Komponen Dalam Negeri

(Diutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa)



Dukungan Pemerintah Dalam Kemudahan Fasilitas Pendanaan

(Jaminan Pemerintah Pusat)

Penugasan BUMN



Pengadaan Barang dan Jasa

(Dapat dilakukan penunjukan langsung, dapat dilakukan re-alokasi anggaran)



Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

(Pengambilan Diskresi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik)



Timeline Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Februari – Mei 2021



Jadwal pelaksanaan tindak lanjut pasca penetapan RPP KPBPB selama 4 (empat) bulan sejak Februari – Mei 2021

Outline Presentasi

1

Arahan Kebijakan Kawasan BBK

2

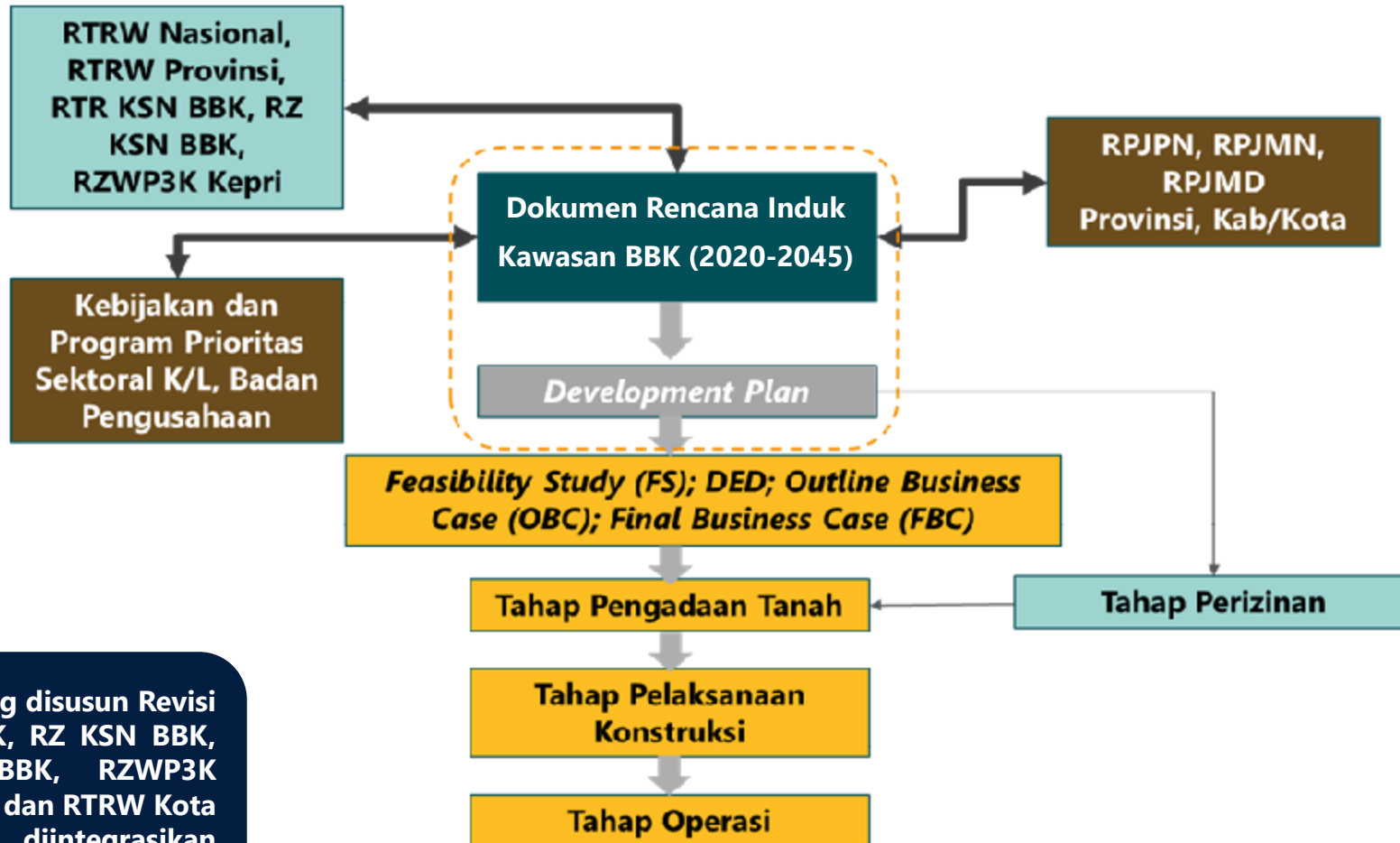
Overview Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

3

Hasil Rapat Pembahasan Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Kedudukan Rencana Induk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebagai arah pembangunan kawasan

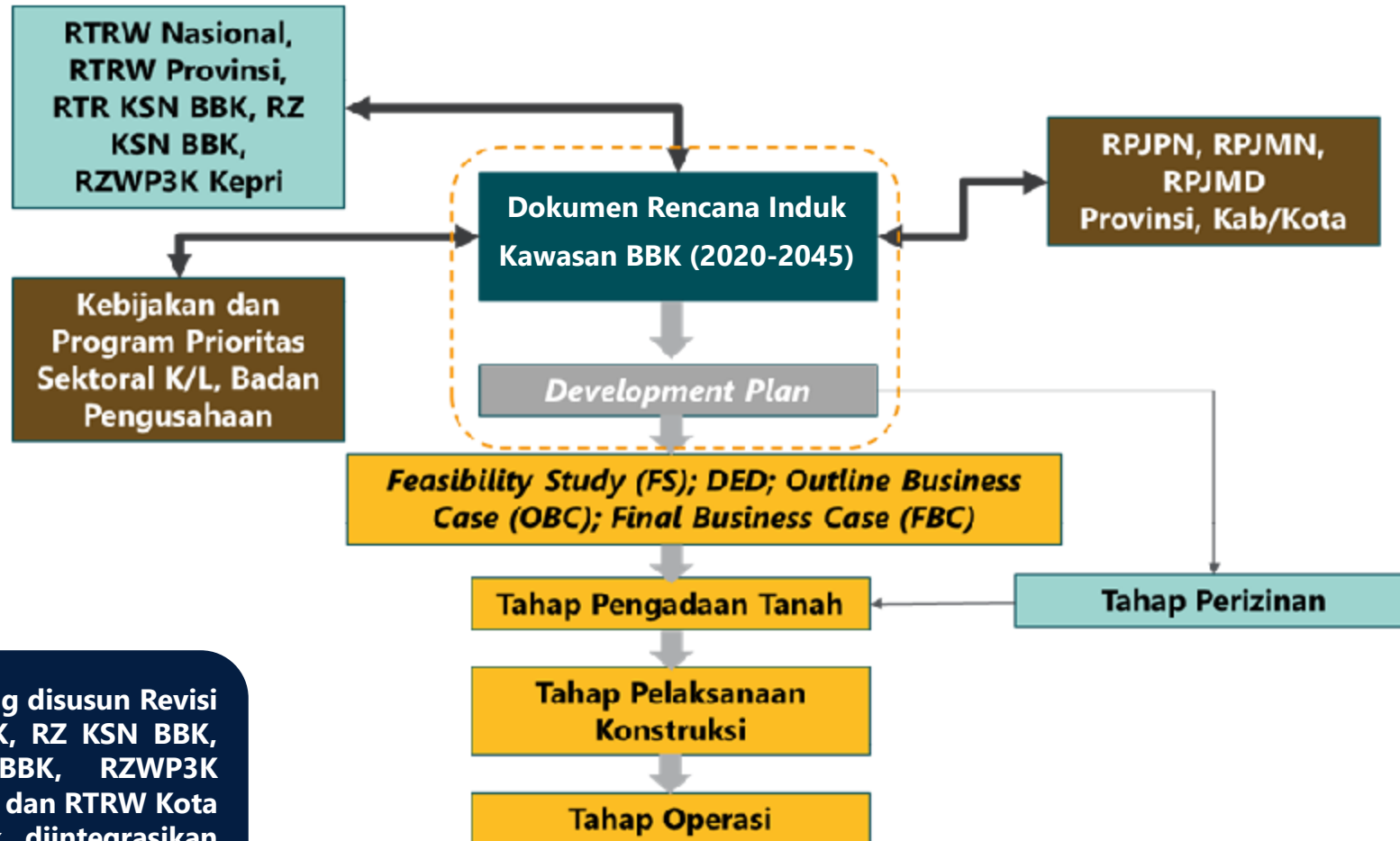


Saat ini sedang disusun Revisi RTR KSN BBK, RZ KSN BBK, RZ KSNT BBK, RZWP3K Provinsi Riau, dan RTRW Kota Batam untuk diintegrasikan dengan RI Pengembangan KPBPB BBK



Kedudukan Rencana Induk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebagai arah pembangunan kawasan



Saat ini sedang disusun Revisi RTR KSN BBK, RZ KSN BBK, RZ KSNT BBK, RZWP3K Provinsi Riau, dan RTRW Kota Batam untuk diintegrasikan dengan RI Pengembangan KPBPB BBK

Substansi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Outline Rencana Induk terdiri dari 6 BAB yang berdasar kepada kajian pengembangan kawasan



JUDUL

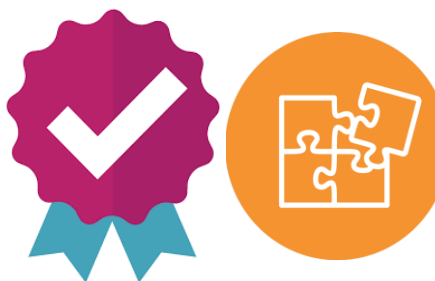
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KPBPB BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

1



Gambaran Umum Wilayah

2



Isu Strategis, Potensi dan Tantangan

3



Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Model Bisnis

4



Pengembangan Kawasan Ekonomi

5



Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

6



Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola

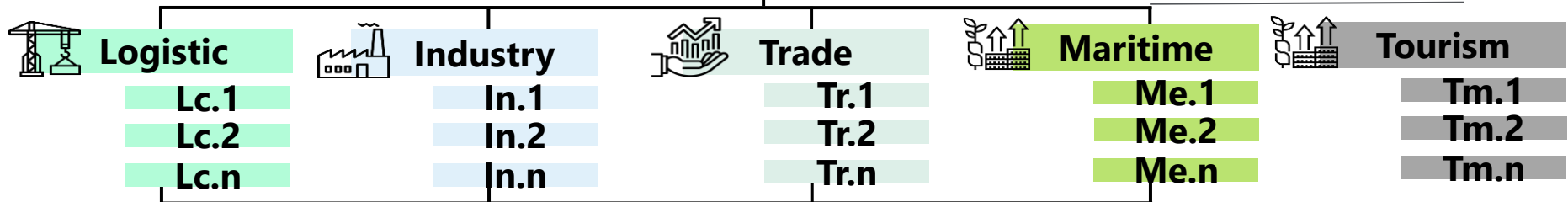
Konsep Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK



Alur pikir dan konsep pengembangan kawasan dalam penyusunan rencana induk

Pembangunan Kawasan BBK

Target Pertumbuhan Ekonomi



Kebutuhan Setiap Sektor



Kesesuaian Peruntukan Ruang

Lokasi

Daftar Program/Proyek

Stakeholder Terkait

Tema Pengembangan Kawasan BBK Tahun 2020-2045

Menjadikan Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing

Karimun

Industri Maritim, Industri *Oil Tanking and Refinery Industry*, Industri Agri-Tech, Industri Pengolahan Hasil Laut, Pariwisata

Batam

Hub Logistik Internasional*, Industri Kedirgantaraan, Industri *Light and Valuable***^{*,} Industri Digital dan Kreatif, *International Trade and Finance Center*
Integrated Health Tourism

*E-commerce,

**Opto-Electronic, Home Appliance.

Bintan

Pariwisata Internasional*, Industri MRO, Industri Transportasi**^{*,} Industri Pengolahan Makanan***^{*,} Industri Maritime Defense, Industri Olahraga, Wisata Heritage Melayu-Tiongkok, Industri Halal*^{*,} Industri Perikanan, *Business Center*, Pusat Zona Integrasi

*herbal dan kosmetik
Tool and machinery,

*Ecotourism, Beach, Leisure and Sport
Tourism, Wisata Heritage Melayu,

***Alumina Industry, Shipyard

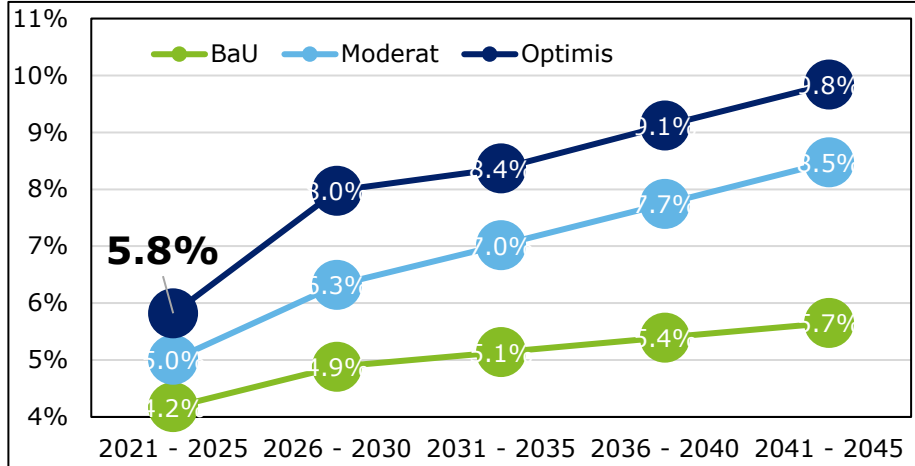
***Halal Industry

(Sumber: Hasil analisis berbagai sumber, LAPI ITB, LPEM UI 2020)

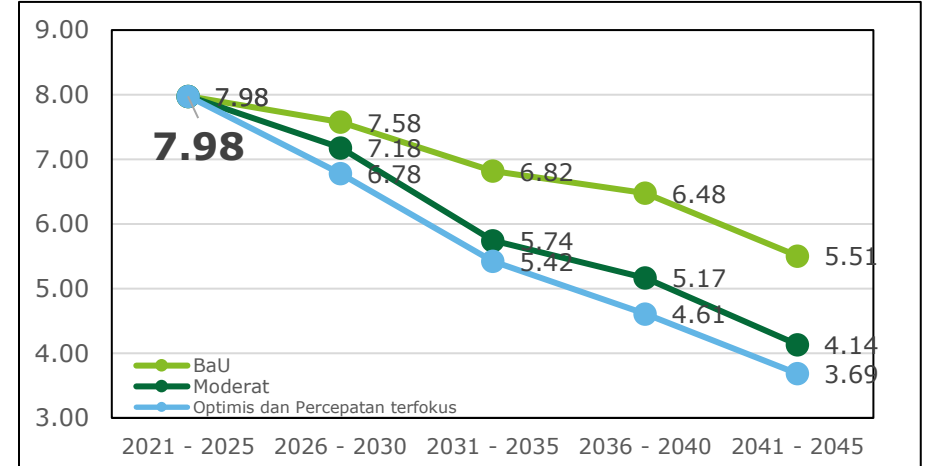
Rencana Pengembangan dalam Rencana Induk KPBPB BBK

Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi berdasarkan Nilai ICOR

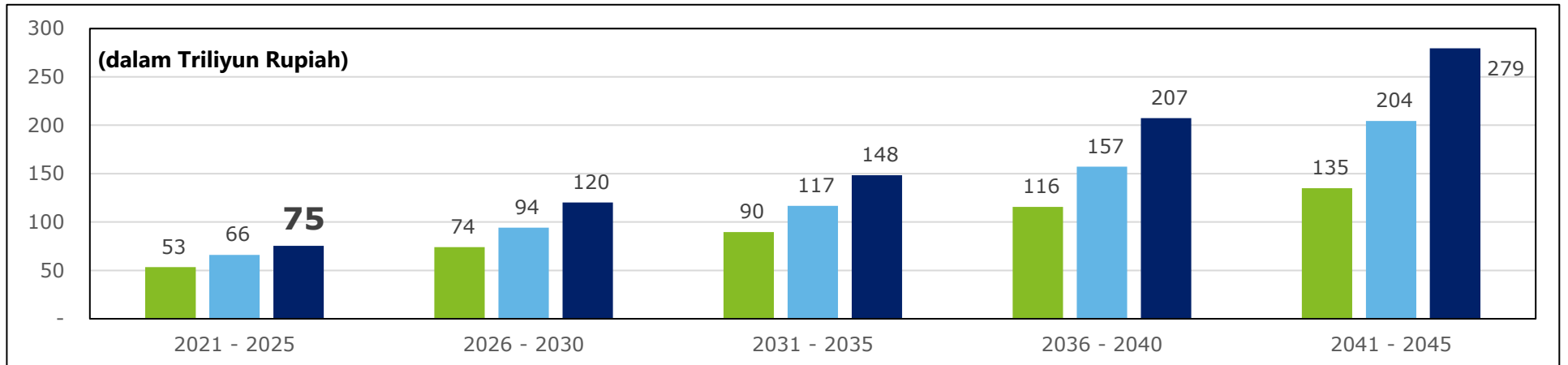
Proyeksi Skenario Pertumbuhan Ekonomi BBK



Nilai ICOR Kawasan BBK



Proyeksi Kebutuhan Investasi Kawasan BBK



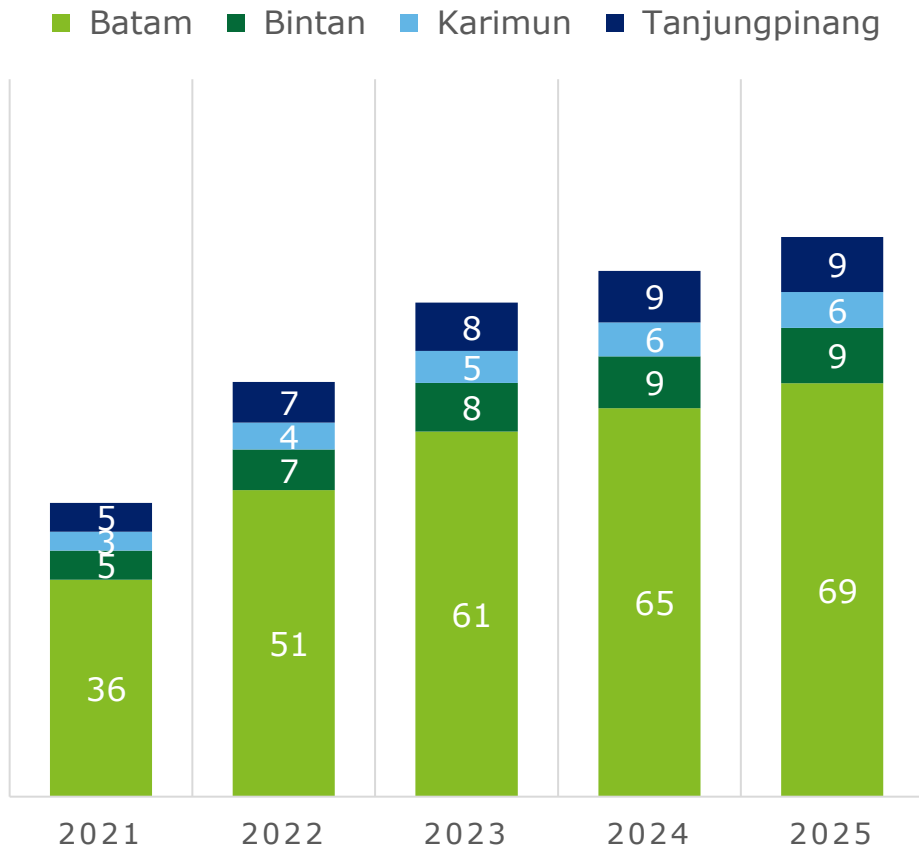
Sumber:

Badan Pusat Statistik (2019), proyeksi oleh LPEM FEB UI (2020) dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

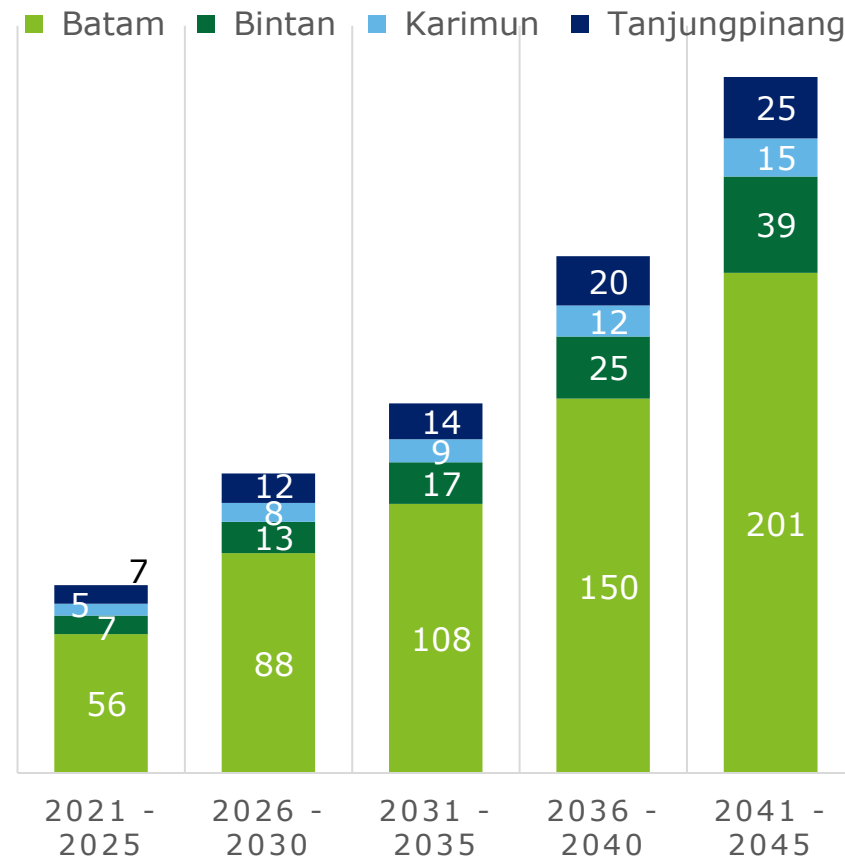
Proyeksi Kebutuhan Investasi per Kawasan

Kebutuhan Investasi terdiri atas investasi baru dan investasi berjalan

Kebutuhan Investasi Tahunan Kawasan BBK 2021-2025 (Trilyun Rupiah)



Rata-rata Kebutuhan Investasi Tahunan Kawasan BBK 2021 – 2045 (Trilyun Rupiah)



Sumber:

Badan Pusat Statistik (2019), proyeksi oleh LPEM FEB UI (2020) dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

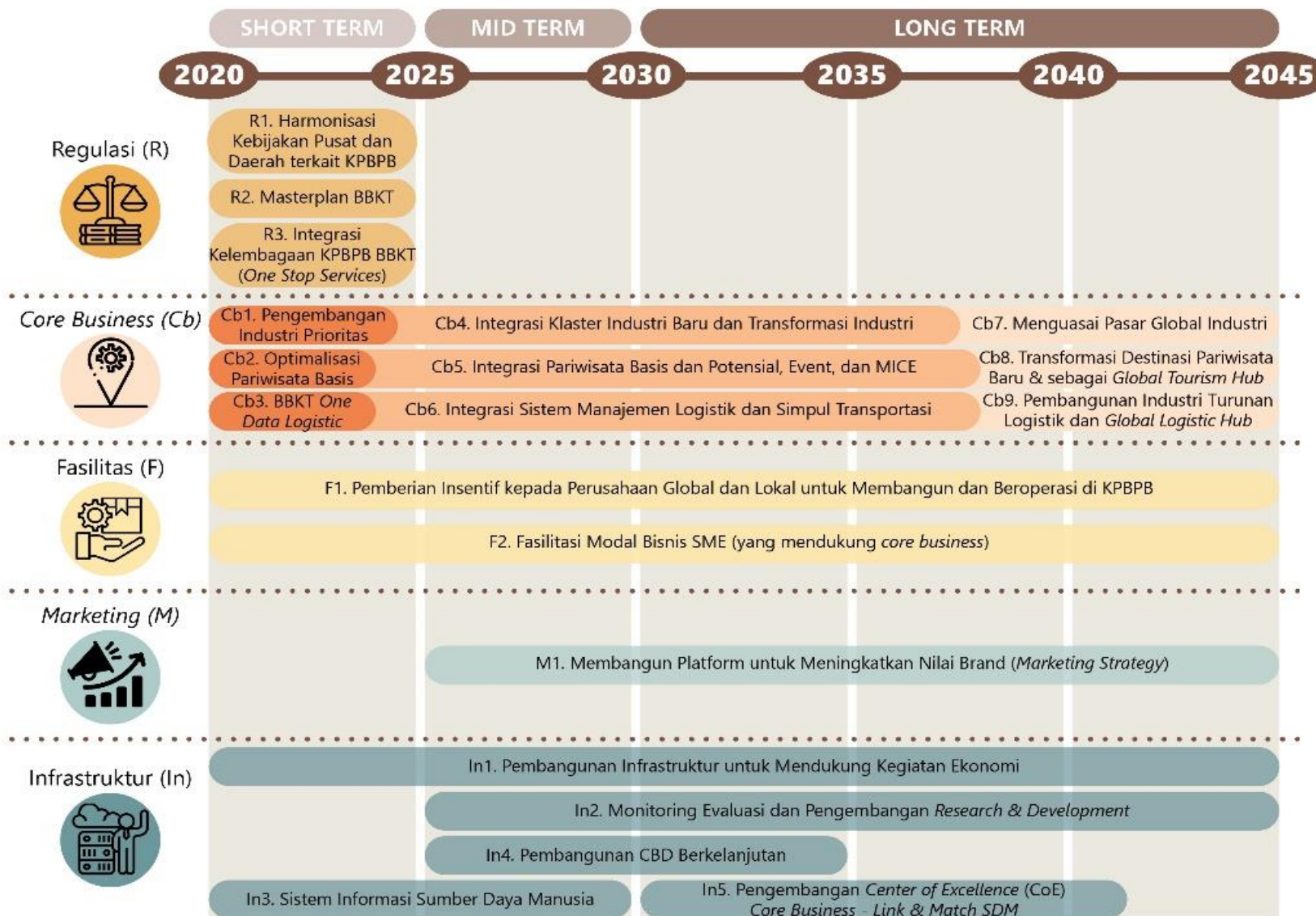
Tahapan Pengembangan Kawasan BBK

High Level Timeline Pengembangan Kawasan BBK



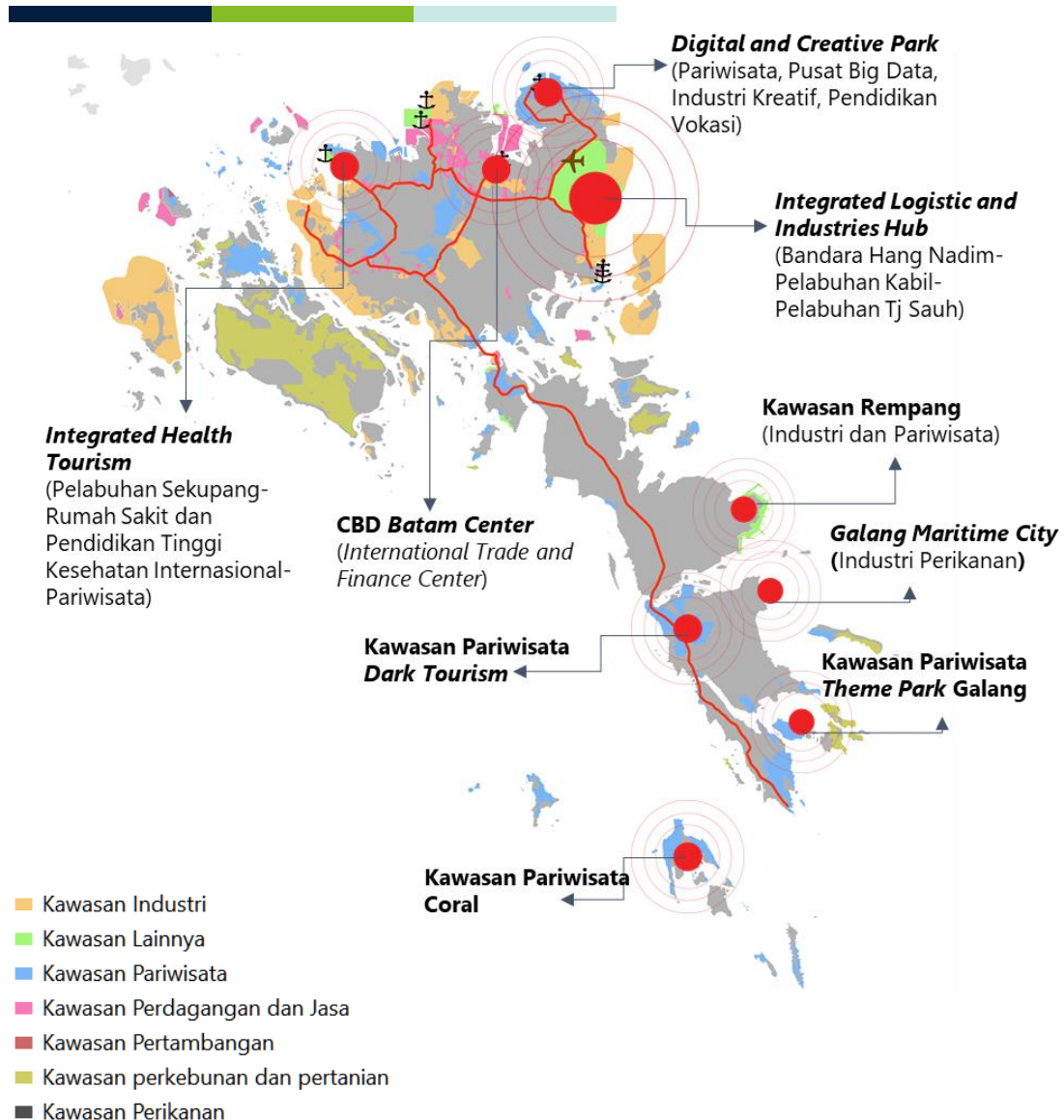
Tahapan Pengembangan Kawasan BBK

High Level Timeline Pengembangan Kawasan BBK



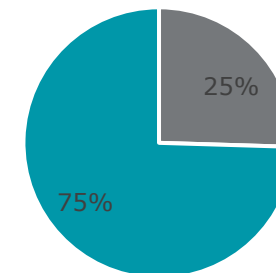
Kawasan Batam

Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional (*e-commerce*), industri kedirgantaraan (MRO), industri *light and valuable (high tech)*, industri digital dan kreatif, serta *international trade* dan *finance center* serta pariwisata



Ketersediaan Ruang yang dapat diusahakan

Batam



■ Luas yang dapat diusahakan (Ha) ■ Total luas

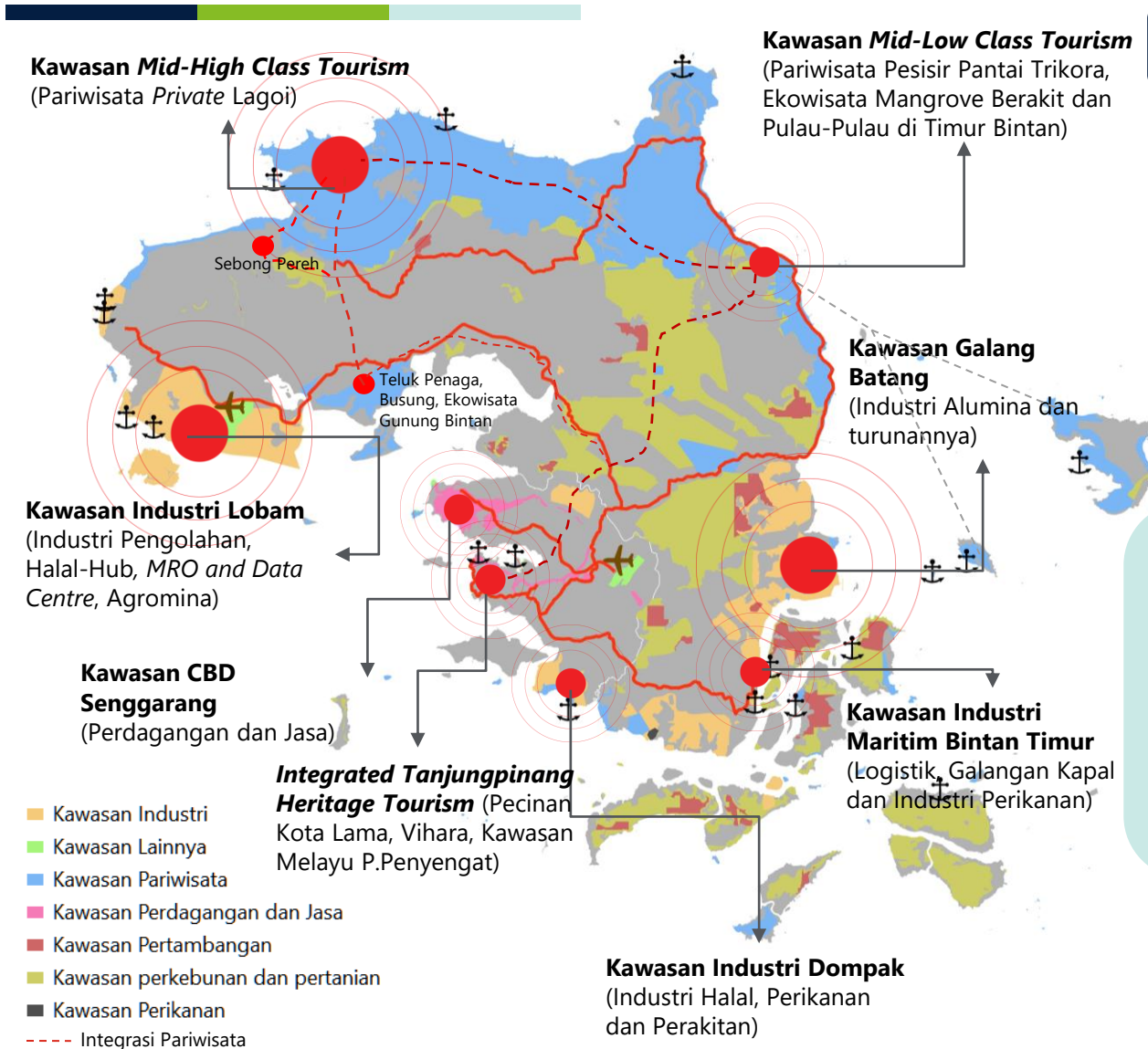
Dari total luas Kota Batam sebesar 111.699 Ha, ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan ialah sebesar 25% atau 38.182 Ha yang terdiri atas peruntukan Kawasan industri, pariwisata, perdagangan-jasa, pertambangan, perkebunan dan pertanian, perikanan dan lainnya.

Sumber: (RTRW Kota Batam 2020-2045)
(Draft Persetujuan Substansi 2020)

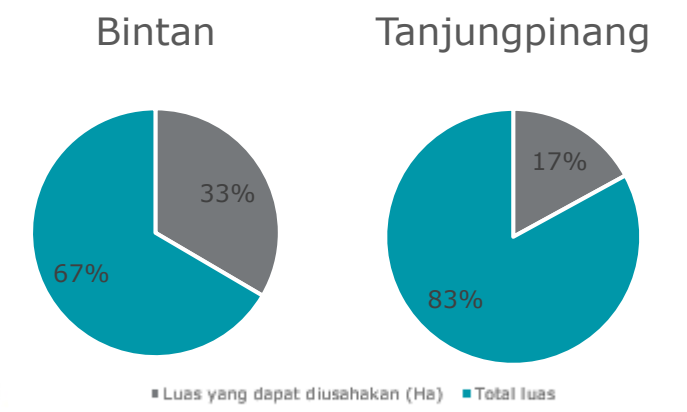
(Sumber: Hasil analisis berbagai sumber, LAPI ITB, LPEM UI 2020)

Kawasan Bintang

Bintang difokuskan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri transportasi (alumina), pengolahan makanan, *maritim defense*, dan olahraga. Tanjungpinang difokuskan pada sektor wisata *heritage*, industri halal, perikanan, *business center*, dan pusat zona integrasi



Ketersediaan Ruang yang dapat diusahakan



Dari total luas Kab Bintang sebesar 132.682 Ha dan Kota Tanjungpinang sebesar 14.692 Ha, dimana ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan ialah sebesar 33% atau 66.692 Ha (Bintan) dan 17% atau 3.016 Ha (Tanjungpinang) yang terdiri atas peruntukan Kawasan industri, pariwisata, perdagangan-jasa, pertambangan, perkebunan dan pertanian, perikanan dan lainnya.

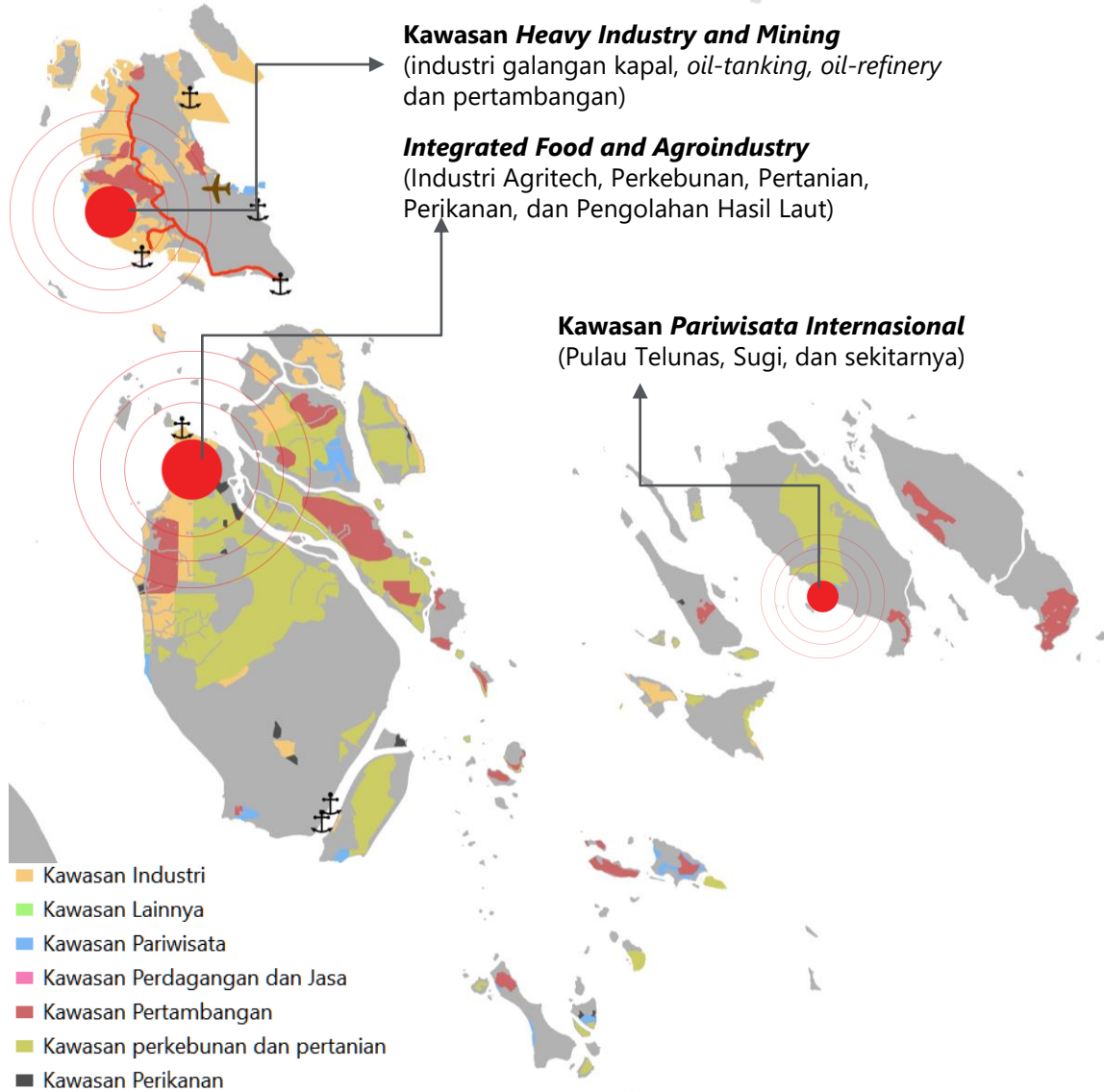
Sumber: RTRW Kab Bintan 2020-2045 (Perda No 1/2020); RTRW Kota Tj Pinang (Perda No 10/2014)

(Sumber: Hasil analisis berbagai sumber, LAPITB, LPEM UI 2020)

Kawasan Karimun

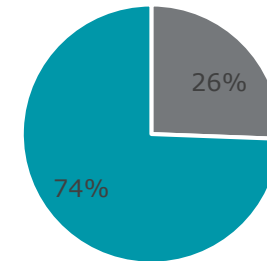


Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri *oil-tanking*, *oil-refinery*, industri *agritech*, pengolahan hasil laut dan pariwisata



Ketersediaan Ruang yang dapat diusahakan

Karimun



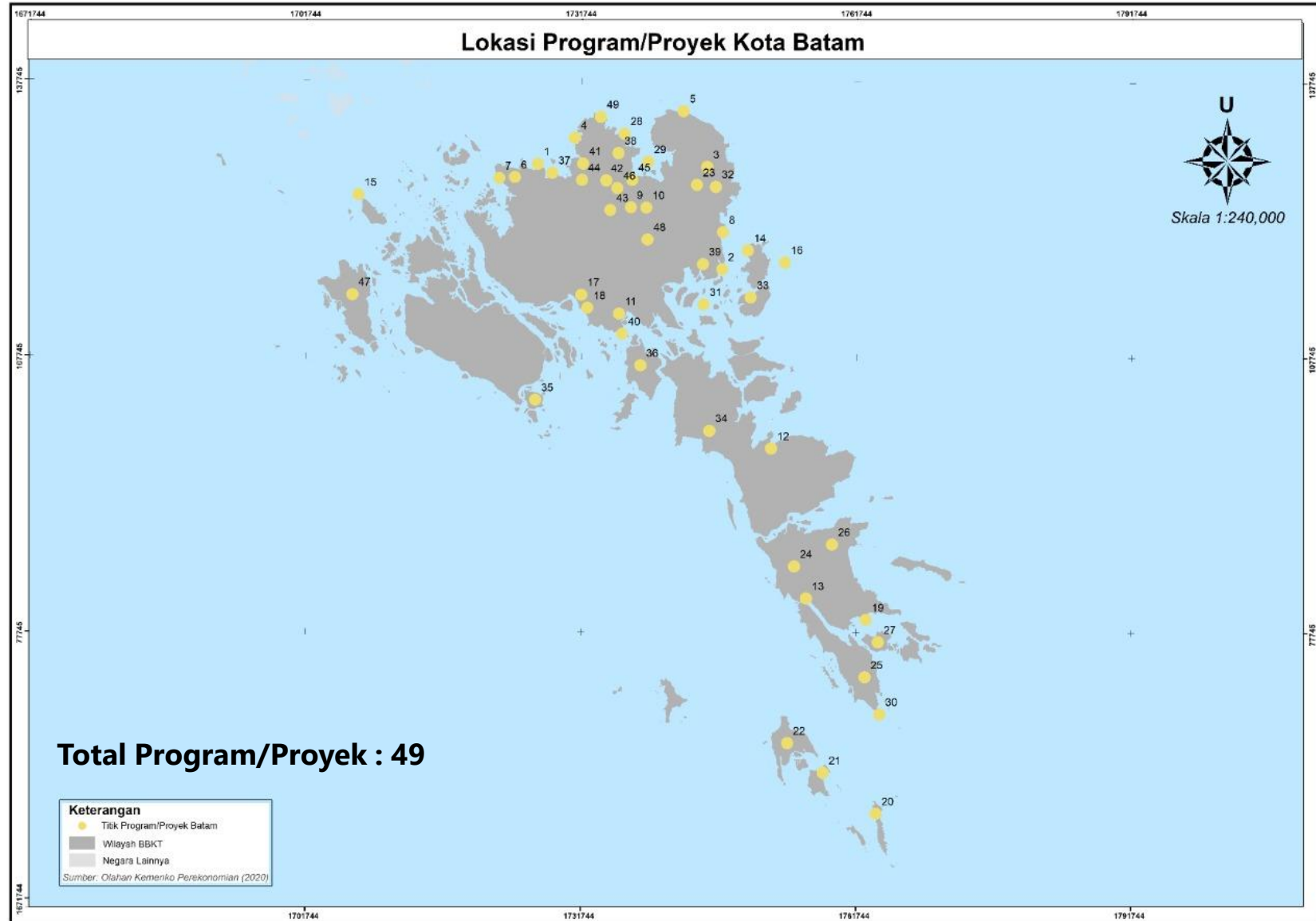
■ Luas yang dapat diusahakan (Ha) ■ Total luas

Dari total luas Kab Karimun sebesar 95.709 Ha, ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan ialah sebesar 26% atau 32.918 Ha yang terdiri atas peruntukan Kawasan industri, pariwisata, perdagangan-jasa, pertambangan, perkebunan dan pertanian, perikanan dan lainnya.

Sumber: (RTRW Kab Karimun 2020-2045)
(Draft Persetujuan Substansi)

(Sumber: Hasil analisis berbagai sumber, LAPI ITB, LPEM UI 2020)

Usulan Program/Proyek Infrastruktur dan Ekonomi yang Potensial di Wilayah Batam-Rempang-Galang





1. Pembangunan *Tunnel* Laut berbasis rel dari Batam-Singapore;
2. Pembangunan Jalan/Jembatan Batam-Bintan;
3. Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim;
4. Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar;
7. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Internasional Sekupang;
8. Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional dan Labuh Jangkar Kabil;
9. Pembangunan Jalan Tol Bandara Hang Nadim - Muka Kuning - Batu Ampar (Fase I);
10. Pembangunan LRT Batam;
11. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Tembesi;
12. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Monggak/Rempang
13. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Gong;
14. Pengembangan Pelabuhan Transshipment Internasional Tanjung Sauh
15. Pembangunan Jaringan Pipa Gas Network Natuna - Batam;
16. Pembangunan pipa air baku Sei Busung, Bintan - Batam;
17. Pembangunan Suplai Energi Terbarukan di Batam
18. Pembangunan Suplai Energi PLTGU di Batam
19. Pembangunan Dam Estuari Galang-Galang Baru;
28. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Internasional Bengkong
30. Pembangunan Pipa Air Baku dari Lingga-Batam
31. Pembangunan Closing Dam Piayu
37. Pembangunan Jalan Outer Ring Road (Tj.Pinggir-Jodoh)
38. Pembangunan Pengelolaan Limbah Terpadu Batam
39. Pengolahan Sampah Waste to Energy di Pulau Kabil
40. Pembangunan Utility Tunnel
42. Pembangunan Jembatan Layang di Baloi
43. Pembangunan Jembatan Fly Over di Kabil

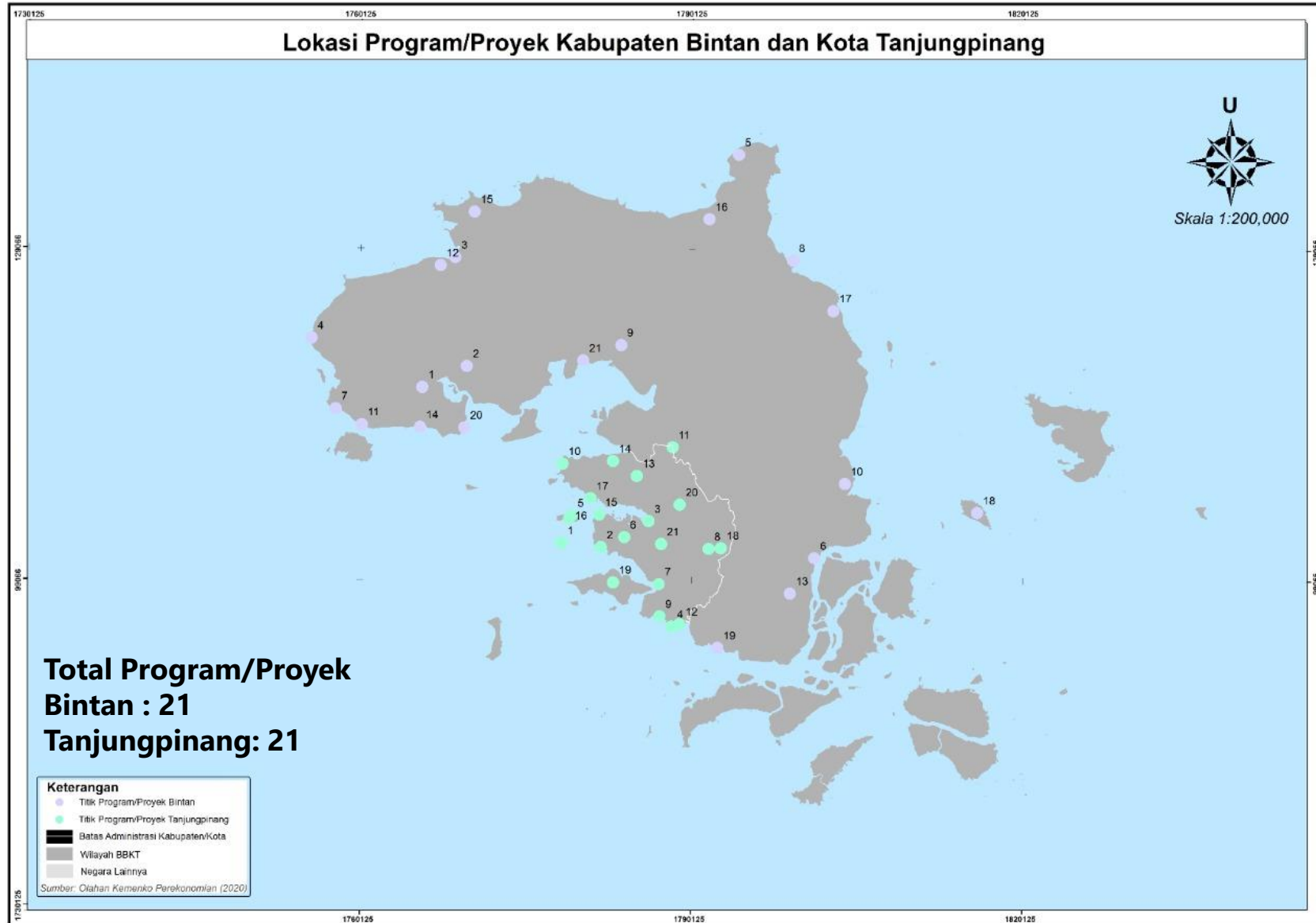
42. Pembangunan Jembatan Fly Over di Simpang UIB
43. Pengembangan Sewerage System Pulau Batam
44. Pengembangan Main Drainage Development
49. Pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center

Program/Proyek Ekonomi

5. *KEK Nongsa Digital Park;
6. *KEK Jasa Kesehatan dan Pariwisata Internasional Sekupang;
20. *KEK Pariwisata Koral (P. Pengelap));
21. *KEK Pariwisata Koral (P. Ranoh)
22. *KEK Pariwisata Koral (di P. Abang Besar);
23. *KEK MRO Batam Aero Technic;
24. Revitalisasi Situs Bersejarah Ex- Camp Vietnam di Pulau Galang
25. Pengembangan Pariwisata Maritim di Pulau Galang Baru;
26. Pengembangan Kawasan Maritim City di P. Galang;
27. Pengembangan Pariwisata Theme Park Galang
29. Pengembangan Kawasan CBD Teluk Tering Batam Center
32. *KEK Pengembangan Aeocity Hang Nadim
33. *KEK Industri di Tanjung Sauh dan Ngenang
34. Pengembangan Kawasan Pulau Rempang
35. Pengembangan Kawasan Industri Pulau Ladi dan Pulau Belangside
36. Pengembangan Kawasan Industri Pulau Setokok
41. Pembangunan Pasar Induk Jodoh
47. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pulau Kepala Jeri
48. Pusat Pelatihan Vokasi Industri dan Logistik di Kabil

*KEK = Usulan KEK

Usulan Program/Proyek Infrastruktur dan Ekonomi yang Potensial di Wilayah Bintan-Tanjungpinang



Program/Proyek Infrastruktur Bintang

1. Pembangunan New Bintang International Air Port dan Industri MRO Bintang Aerospace (BIIE)
2. Pembangunan Dam Estuari Sei Busung;
4. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Tanjung Uban
5. Pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Berakit;
6. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Sei Kolak Kijang
7. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Teluk Sasah;
8. Pembangunan Jaringan Pipa Gas Network Natuna - Bintang-Tanjungpinang
9. Pembangunan Suplai Energi Terbarukan di Bintang-Tanjungpinang
12. Pembangunan Pusat Big Data Colocation Server di Bintang Resort Cakrawala

Program/Proyek Ekonomi Bintang

3. Rute Transportasi Laut Bintang-Johor (via Bandar Bentan Telani)
10. KEK Galang Batang
11. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan Sri Udana (BIIE)
13. Pengembangan Industri di Kawasan Maritim Bintang Timur
14. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Bintang dan Tanjungpinang
15. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Lagoi)
16. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Ekowisata Mangrove)
17. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Pesisir Trikora)
18. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Pulau Pangkil dan Sekitarnya)
19. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Sun Resort)
20. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Busung/Kuala Sempang)
21. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Ekowisata Gunung Bintang)



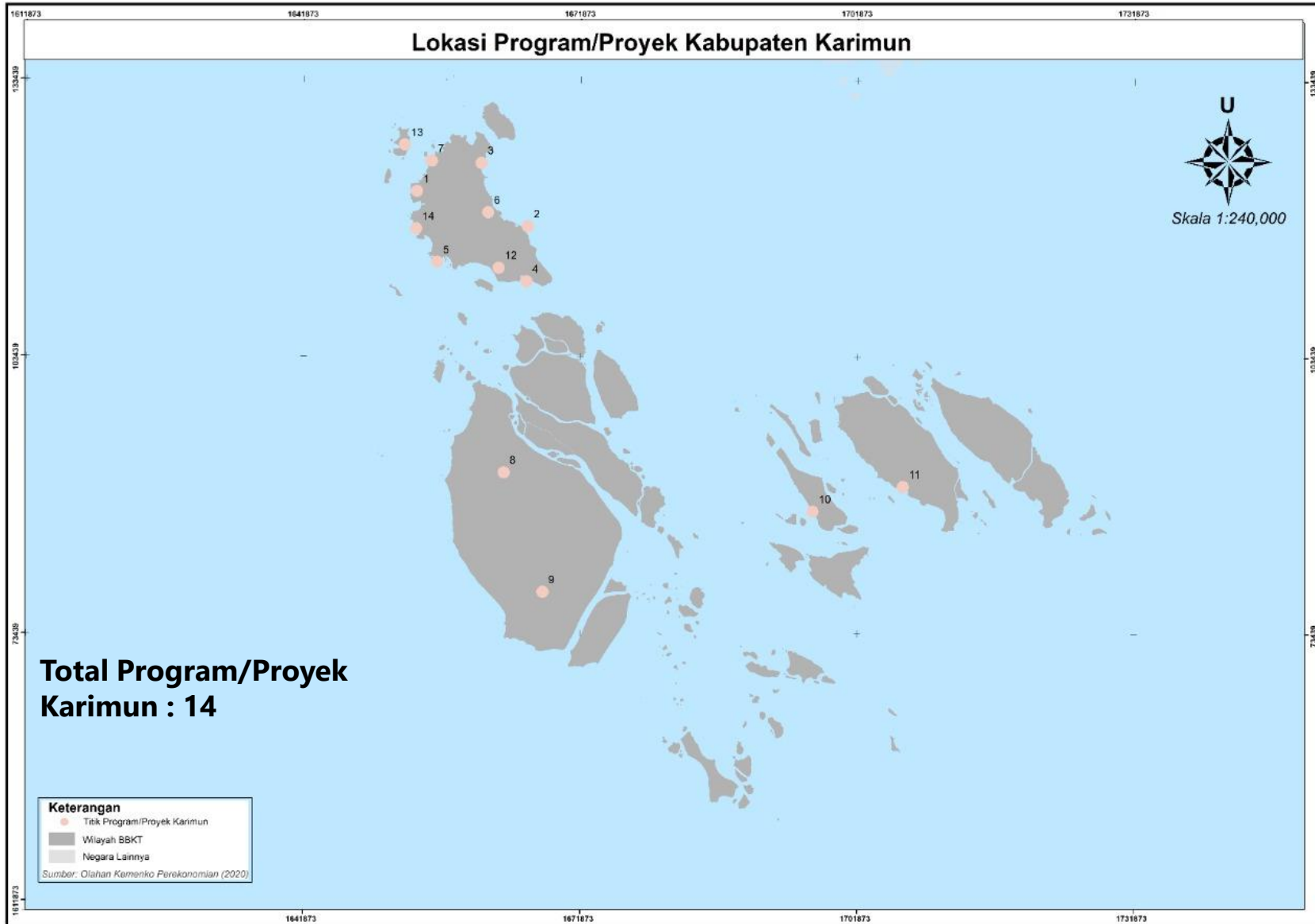
Program/Proyek Infrastruktur Tanjungpinang

2. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Sri Bintang Pura;
3. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Sri Payung Batu Anam
4. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Tanjung Moco
5. Revitalisasi Pelabuhan Penumpang Penyengat
7. Pembangunan Estuari DAM Dompok
8. Pembangunan Jalan Lingkar antar FTZ di Tanjungpinang-Bintang
12. Pembangunan Supply Energi Terbarukan di Tanjungpinang

Program/Proyek Ekonomi Tanjungpinang

1. Pembangunan Rute Tol Laut BBK
6. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang
9. Pengembangan Industri di Kawasan FTZ Dompok
10. Pengembangan CBD dan Industri Kawasan FTZ Senggarang
11. Pengembangan Eco-Industrial Park Air Raja di Tanjungpinang
13. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Bukit Manuk)
14. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Kampung Bugis)
15. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Kota Lama)
16. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Penyengat)
17. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Senggarang)
18. Integrasi Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang (Vihara)
19. Pengembangan Pariwisata Heritage Melayu-Tiongkok Tanjungpinang
20. Pusat Pelatihan Vokasi sektor Industri, Logistik & Pariwisata di Tanjungpinang
21. Percepatan Reforma Agraria di Tanjungpinang

Usulan Program/Proyek Infrastruktur dan Ekonomi yang Potensial di Wilayah Bintan-Tanjungpinang





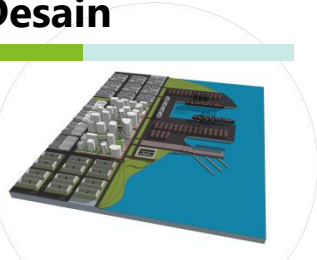
Program/Proyek Infrastruktur Karimun

2. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Tebing
3. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik-Internasional Malarko
4. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Tanjung Balai
5. Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Roro Parit Rempak
6. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah
8. Pembangunan Suplai Energi Terbarukan di Karimun

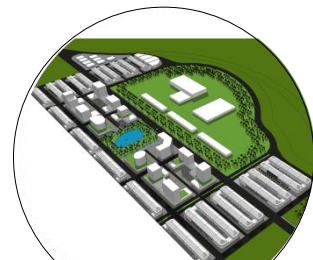
Program/Proyek Ekonomi Karimun

1. Pengembangan Industri Galangan Kapal di Karimun
7. Pengembangan Industri Oil Tanking, Refinery Oil, dan Industri Berat di Karimun
9. Pusat Agribisnis, Industri Agri-tech, dan Agrowisata di Pulau Kundur
10. Pembangunan Industri Perikanan di Pulau Moro
11. Pengembangan Pariwisata di Pulau Telunas dan Pulau Sugi
12. Pengembangan Wisata Religi dan Budaya di Tanjung Balai Karimun
13. *KEK Pulau Asam
14. Pengembangan Industri Pertambangan Granit di Karimun

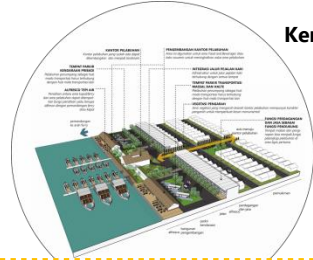
*KEK = Usulan KEK



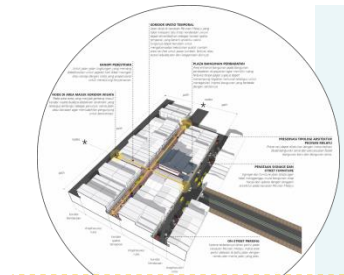
TIPOLOGI CBD



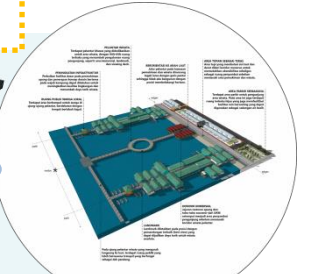
TIPOLOGI DISTRIK DIGITAL



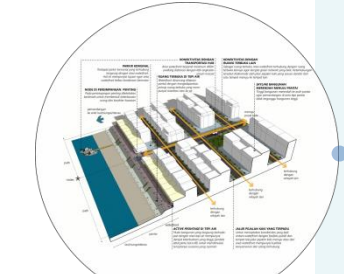
TIPOLOGI PELABUHAN PENUMPANG



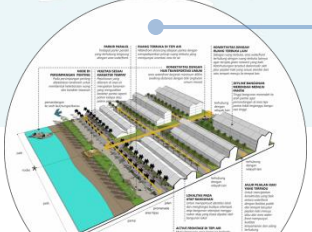
KONSEP KONSERVASI TANJUNG BALAI



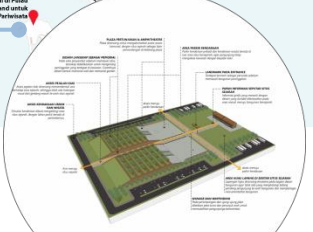
KONSEP KONSERVASI KAMPUNG APUNG /KAMPUNG BUGIS



TIPOLOGI URBAN WATERFRONT



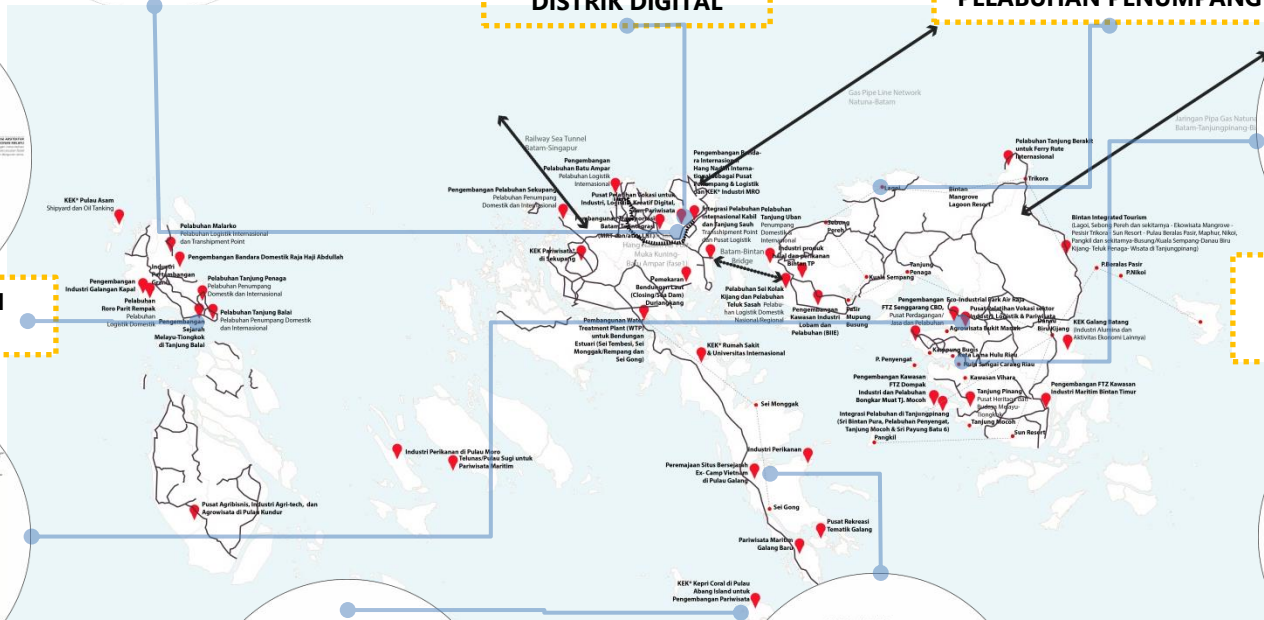
TIPOLOGI BEACH TOURISM



KONSEP KONSERVASI EX CAMP VIETNAM



KONSEP KONSERVASI KAMPUNG TUA



Titik titik kawasan ekonomi dikategorikan menjadi beberapa tipologi urban design sebagai arah pengembangan untuk direncanakan dengan lebih detail.

Prioritisasi Program/Proyek Potensial Rencana Induk KPBPB BBK



Prioritisasi berdasarkan beberapa penilaian

P1

1. Prioritas Sangat Tinggi

- Memberikan kontribusi strategis terhadap pembangunan Nasional dan Kepri
- Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dalam skala regional

P2

2. Prioritas Moderat

- Telah memiliki Kajian (Pra FS, FS, MP/DP, DED), namun belum terbukti memenuhi aspek kelayakan
- Termasuk Program Prioritas Pemprov, namun belum ada PJKP (blm dikomunikasikan dgn K/L, BUMN atau Investor/Swasta)

P3

3. Prioritas Tersier

- Memiliki nilai investasi <IDR 100M dan tidak termasuk dalam *core business* kawasan
- Belum terdapat Kajian (Pra FS, FS, MP/DP) yang memadai

P4

4. Prioritas Rendah

- Proyek/Program dapat dilaksanakan oleh Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara otonom
- Proyek/Program tidak mendesak untuk dilaksanakan dalam periode *short term*
- Berisiko untuk tidak terwujud hingga 2025



Proyek/Program yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat, K/L, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Badan Pengusahaan, serta Pemangku Kepentingan lainnya, akan dinilai berdasarkan kriteria untuk menentukan prioritas program/proyek

Outline Presentasi

1

Arahan Kebijakan Kawasan BBK

2

Overview Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

3

**Hasil Rapat Pembahasan Raperpres
Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK**

Hasil Rapat Pembahasan Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dengan K/L

Jakarta, 4 Maret 2021



Kementerian Keuangan

Kebutuhan anggaran Rencana Induk untuk dapat dimasukkan dalam rencana kerja K/L di tahun 2022;



Kementerian Perindustrian

Rencana Induk agar selaras dengan Rencana Industri Nasional yang memasukan **unsur Industry 4.0 dan memperhatikan rantai pasok serta integrasi supply demand**;



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana Induk agar **mendetilkan lokasi program/proyek** untuk dapat diintegrasikan dengan RTR dan RZ KSN BBK;



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Area pengembangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan dapat diselesaikan dengan **perubahan peruntukkan secara parsial atau perubahan tata batas dengan provinsi** dan didukung dengan data spasial yang baik;
- Rencana Induk **agar didukung dengan KLHS**.



Kementerian PUPR

Rencana Induk agar **mempertimbangkan daya saing antar pulau** khususnya dalam **pergerakan orang dan barang**

- Rencana Induk agar **memperhatikan penyiapan perumahan untuk mempersiapkan peningkatan penduduk** dengan pengembangan Kawasan BBK
- Rencana Induk agar **mengakomodir program yang sudah berjalan** seperti RPJMN;



Kementerian Perhubungan

- Rencana Induk diharapkan **dapat mendukung integrasi kepelabuhanan** di Kawasan BBK;
- Agar dapat **membantu debottlenecking permasalahan** pada program/proyek terkait perhubungan



Bappenas

Rencana Induk **agar selaras dengan dokumen perencanaan lain yang telah dan akan disusun**



Kementerian Sekretariat Negara

- Agar **mempercepat legal procedure** terkait penyusunan dan penetapan Perpres;

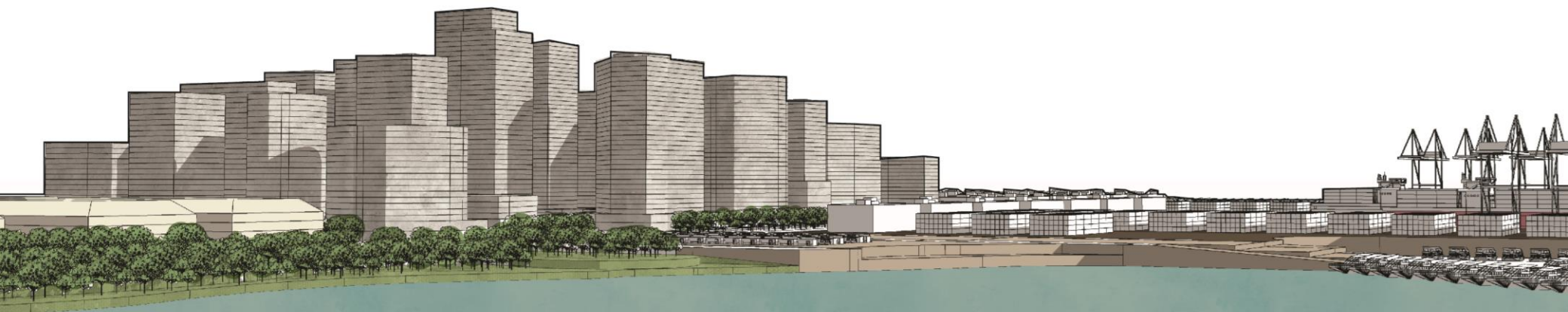


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang

+62 21 3456714
tarukse.ekon@gmail.com



Tindak Lanjut Pembahasan Raperpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

Jakarta, 4 Maret 2021



Masukan dari K/L terkait terhadap Raperpres dan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ditunggu paling lambat tanggal **11 Maret 2021** ke **tarukse.ekon@gmail.com / narahubung pada undangan - Hikmat (0813 81 323 323)**